

Globalisasi, Suburbanisasi Jakarta dan Transformasi Sosial Ekonomi Depok

Asep Suryana

Daftar Isi Penutup

Pengantar	1
Jejak Historis	2
Hirarki Kawasan Kota	5.
Dua Momen Transformasi	10
Otonomi dan Politik Lokal	12
Penutup	15

Pengantar

Daerah perkotaan tumbuh sangat dramatis terutama di abad ke-20. Di Indonesia sendiri, penduduk yang tinggal di daerah perkotaan menjelang pergantian abad ini adalah 36,46%. Menurut para ahli, meningkatnya proporsi daerah yang didefinisikan sebagai kota ini dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi yang lebih luas. Studi Somantri (2000a) misalnya, memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk dan luas wilayah Kota Jakarta yang sangat pesat, terdorong oleh proses incorporasi Kota Utama Indonesia tersebut terhadap sistem pembagian kerja tingkat dunia pada awal tahun 1970-an. Proses incorporasi ini telah mengakibatkan Jakarta terlibat secara intensif dalam sistem perdagangan dan produksi dunia, sehingga melahirkan proses migrasi desa-kota yang fenomenal.

Senada dengan studi Somantri, masih banyak studi tentang proses urbanisasi (pengkotaan) yang memperlihatkan bahwa proses urbanisasi tersebut ternyata terkait dengan pergeseran fungsi dan peran kota tersebut dalam system pembagian kerja dunia (lihat Douglass, 1993; Kiyonari, 1993; Smith, 1996; Smith dan Feagin, 1993). Studi-studi tentang proses urbanisasi tersebut sebagian besar didominasi oleh pendekatan perluasan kota (*urban expansion*), dan sedikit studi yang terfokus pada proses suburbanisasi.

Dalam kaitan ini, Allinson (1979), Marzali (1988) dan Mc Gee (1991) dapat dikatakan sebagai perintis studi suburbanisasi. Allinson (1979) telah melakukan studi tentang proses

pertumbuhan dan dinamika internal suburban-suburban Tokyo akibat proses internasionalisasi Kota Tokyo. Marzali (1988) melakukan studi proses suburbanisasi terhadap Condet, suatu wilayah pinggiran Jakarta akibat perluasan kota Jakarta akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Sedangkan Mc Gee (1991) telah melakukan studi tentang transformasi sosial ekonomi di wilayah pedesaan karena semakin terintegrasinya desa-desa tersebut ke dalam jaringan kota Pulau Jawa.

Dari tinjauan studi para ahli di atas, tampak jelas bahwa proses suburbanisasi (yang dalam artikel ini didefinisikan sebagai transformasi sosial ekonomi dari *rural* ke *urban*) pada wilayah pinggiran terjadi karena wilayah tersebut dijadikan sebagai penyangga (*buffer area*) kota utama tersebut, akibat bergesernya fungsi kota tersebut dalam sistem ekonomi dunia. Berpijak pada gagasan ini, kita dapat menarik tesis bahwa transformasi sosial ekonomi yang terjadi secara dramatis saat ini di Depok terjadi bersamaan dengan proses incorporasi Jakarta dalam sistem ekonomi dunia pada tahun 1970-an. Akibat incorporasi ini, jumlah penduduk, jumlah investasi dan perdagangan, dan luas wilayah Jakarta meningkat. Proses ini akhirnya mendorong Jakarta menganeksasi wilayah-wilayah pinggirannya agar menjadi penyangganya, yang sebelum itu didefinisikan sebagai wilayah rural (Marzali, 1989; Somantri, 2000a). Depok, yang jaraknya kurang lebih 40 km arah selatan dari pusat Kota Jakarta, akhirnya mengalami proses ini terutama menjadi penyangga Jakarta dalam bidang pemukiman, pendidikan dan resapan air (Pengemanan, 1985). Dan, bersamaan dengan proses suburbanisasi ini, Depok mengalami proses transformasi sosial ekonomi yang dramatis.

Jejak Historis

Sebelum membahas transformasi sosial ekonomi Depok kontemporer, penulis memandang penting untuk menelusuri jejak historis penetrasi pembagian kerja internasional masa lalu. Hal ini disebabkan dua alasan. Pertama, untuk mengukur tingkat keterpengaruhan dan peran Depok (yang tentu saja terkait dengan Jakarta) dalam sistem ekonomi dunia. Kedua, pelacakan ini akan memberikan pemahaman yang lebih utuh untuk menjawab pertanyaan: Mengapa Perum Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional) memilih wilayah Depok sebagai *pilot project* perumahan skala luas pada awal tahun 1970-an yang menjadi fase awal transformasi sosial ekonomi Depok kontemporer.

Jejak historis bagaimana pengaruh ekonomi dunia terhadap dinamika sosial ekonomi lokal Depok ini dapat dibagi dua. Pertama, pada masa Kerajaan Pajajaran, dan kedua, pada fase Depok menjadi perkebunan partikelir milik Cornelis Chastelein. Sekalipun tidak ada data-data yang valid, namun sejak zaman Kerajaan kita dapat menduga bahwa dinamika sosial ekonomi lokal Depok terkait dan dipengaruhi oleh struktur ekonomi global. Jika dugaan Dhumhur (1996) benar, bahwa kampung-kampung tua di bagian Selatan Depok yang masih bias kita jumpai saat ini (seperti Parung Malela, Parung Balimbing, Parung Serab, Karang Anyar dan Pabuaran) telah ada sejak zaman Pajajaran, hal ini menandakan bahwa jalur perdagangan sungai Pakuan-Sunda Kelapa untuk menyuplai komoditi yang laku di pasaran global yang sangat ramai untuk ukuran masa itu, telah membentuk karakter sosial ekonomi pemukiman paling awal di Depok tersebut. Pada saat itu Depok merupakan tempat transit perdagangan sungai antara Pakuan (Bogor) dengan Sunda Kelapa (Jakarta). Menurut perkiraan Danasasmita (1983) dan Somantri (2000a), kurang lebih 5.000 pikul rempah (satu pikul kurang lebih 20 kg) dikirim dari Pakuan ke Sunda Kelapa. Apalagi bila dugaan Danasasmita (1983) tentang adanya kerajaan kecil (sekitar 15 km arah utara Depok) yang hidup dari jalur perdagangan Sungai Ciliwung memang benar, maka data tersebut akan semakin memperkuat gagasan kita ini.

Suatu struktur sosial ekonomi dan politik lain yang bercorak kolonial terbentuk setelah Depok menjadi tanah partikelir yang berfungsi menyediakan komoditi perkebunan untuk pasar dunia. Perubahan struktur sosial ekonomi lokal Depok ini menjadi pertanda pergeseran fungsi Depok terhadap Jakarta. Pada masa Depok pra kolonial, struktur sosial ekonomi lokal Depok yang terbentuk bertumpu pada fungsi Depok sebagai salah satu tempat transit perdagangan sungai. Sedangkan pada masa kolonial, struktur sosial ekonomi Depok terbentuk karena fungsinya sebagai komoditi hasil perkebunan. Struktur sosial ekonomi Depok ini memiliki tiga ciri berikut: (lihat Marzali, 1975; Nirmalawati, 1990; Poernomo, 1990; Poernomo, 1994;).

Pertama, dari sudut kepemilikan tanah, status Depok dirancang secara khusus dengan hak *eigendom*, yaitu suatu hak pengelolaan penuh (“*Landheerlijke rechten*”) sehingga pemilik tanah seolah-olah memiliki kedaulatan tersendiri seperti sebuah “negara”. Dengan hak *eigendom* ini membuat pemilik tanah Partikelir Depok dapat berbuat apa saja untuk meningkatkan hasil-hasil perkebunannya. Dalam keleluasaan berbuat apa saja karena status khususnya ini, Cornelis Chastelein (bekas petinggi *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC)), VOC membangun suatu

sistem sosial budaya dan ekonomi komunitas perkebunan tersebut yang berlandaskan pada etika Protestan yang sangat ketat.

Kedua, orientasi sosial ekonomi dan politik komunitas Kota Depok Lama ini adalah ke Batavia. Gaya hidup orang Depok Lama ini selalu menyesuaikan diri dengan *trend* yang ada di Batavia. Dalam konteks ini kita dapat memahami mengapa struktur sosial Depok pun bercorak kolonial dan sesuai dengan *Staat Regering* pasal 163 Tahun 1910, yang menempatkan Agama Kristen, kulit putih dan bahasa Belanda sebagai status simbol utama. Sedangkan penduduk asli, sekalipun telah tinggal di situ sebelum Depok dijadikan perkebunan, tidak dianggap sebagai bagian dari komunitas mereka dan tidak memiliki hak untuk memiliki tanah oleh sistem hukum kolonial Belanda. Perbedaan ini disebabkan karena mereka beragama Islam, suatu agama yang dianggap musuh kolonial Belanda.

Ketiga, struktur sosial ekonomi Kota Depok Lama ini terkena pengaruh yang mendalam tatkala Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan dua kebijakan (Kebijakan Pintu Terbuka pada tahun 1870 dan Politik Etis pada awal abad ke-20) untuk memantapkan posisinya sebagai penghasil utama komoditi produk perkebunan untuk pasar dunia. Melalui pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Belanda tersebut sebagai konsekuensi dua kebijakan tersebut, banyak orang Depok yang bekerja di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta yang tumbuh pesat akibat banyaknya investasi yang masuk setelah Kebijakan Pintu Terbuka. Fenomena ini sesuai dengan tujuan pendirian sekolah-sekolah Belanda tersebut, yaitu untuk mencetak tenaga menengah terampil dan melek huruf yang akan meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penyaluran komoditi tersebut untuk pasar dunia.

Pergeseran pekerjaan di sebagian penduduk Kota Depok lama ini juga didukung oleh berfungsinya jalur kereta api Batavia–Buitenzorg, yang selesai dibangun oleh *Staats Spoorweg* pada 15 Mei 1885 (yang dibangun untuk memudahkan pengiriman hasil bumi dari pedalaman ke Batavia), sehingga membuat mereka dapat melakukan komutasi dari Depok (Wulan, 1985: 24). Proses ini akhirnya membentuk suatu pelapisan sosial secara internal, baik dari segi pekerjaan, orientasi gaya hidup maupun orientasi sosial politik, di kalangan keturunan budak Chastelein ini.

Semua *privilege* yang dimiliki oleh Orang Depok Lama pada masa kolonial Belanda tersebut hancur sama sekali pada saat kedatangan Jepang. Jepang saat itu sedang berusaha merebut wilayah sumber komoditi hasil perkebunan dari bangsa-bangsa Barat. Proses ini

diekspresikan dalam wujud membabat habis semua yang berbau Barat. Dalam konteks Depok, keturunan bekas Chastelein ini yang sangat berpihak pada Belanda terkena imbasnya. Mereka menjadi strata terbawah, dibenci dan dimusuhi. Keadaan ini membuat mereka berpihak pada Tentara Belanda saat Belanda ingin kembali menjajah Indonesia pada masa Revolusi. Konflik fisik antara Orang Depok Lama dengan Orang Kampung sering terjadi. Hal ini menimbulkan dampak psikologis yang berat pada Orang Depok Lama, sehingga mereka bersikap apatis terhadap kehidupan sosial politik karena merasa bahwa mereka tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial paska kemerdekaan. Marzali (1975) menyebut gejala ini sebagai “krisis identitas”.

Tanggal 14 Agustus 1952, *Gementee Depok* (status tanah partikelir dengan hak *eigendom*) dihapuskan. Meskipun demikian, atas permintaan penghuni Kota Depok Lama, pemerintah Indonesia memberikan kuasa pada mereka untuk mengurus dan memiliki beberapa tanah dan bangunan yang memiliki fungsi sosial, seperti gereja, kuburan, dan rumah sakit. Sebagai kelanjutan keputusan tersebut, Orang Depok Lama mendirikan Yayasan Cornelis Chastelein. Hingga saat ini, keanggotaan Yayasan Cornelis Chastelein ini menjadi elemen pembeda antara Orang Depok Lama dengan penduduk yang lain (Poernomo, 1994).

Hirarki Kawasan Kota

Untuk memahami proses transformasi sosial ekonomi yang terjadi di dalam wilayah Depok dapat dilakukan dengan menelusuri pola perkembangan infrastruktur sosial ekonomi dan hirarki kawasan dalam kota Depok. Struktur hirarki kawasan kota ini terbentuk karena fungsinya sebagai penyangga Jakarta. Jalur distribusi, infrastruktur dan pola aktivitas setiap kawasan ini tersusun secara hirarkis dalam kawasan primer, kawasan sekunder dan kawasan tertier (bandingkan dengan Somantri, 2000a). Struktur hirarkis kawasan ini, secara geografis terbelah dua. Semakin ke Selatan, infrastruktur dan pola aktivitasnya penduduk Depok cenderung *rural*. Sebaliknya semakin ke Utara, infrastruktur dan pola aktivitasnya tersebut cenderung *urban*.

Kawasan primer. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas untuk seluruh kota dan berlokasi di pusat kota Depok. Di sana terdapat pusat perdagangan (2 mall, 2 grosir dan dua pasar harian) yang melayani seluruh kebutuhan penduduk Depok; terminal bus, stasiun kereta listrik, pusat-pusat rekreasi, pemukiman penduduk lapisan menengah-atas (“real estate” dan

“perumnas”) dan kampung “padat”. Selain memiliki fungsi ekonomi untuk seluruh warga Depok, pusat kota ini juga merupakan perlambang aktivitas pemerintahan di tingkat kota. Di kawasan ini terdapat Balaikota, Kantor Dewan Perwakilan Kota Depok, Kantor Kepolisian Kota Depok dan Pengadilan Negeri Depok. Dengan demikian Kawasan primer adalah kawasan Depok yang paling *urbanized*.

Kawasan primer ini berada sepanjang Jalan Margonda Raya (jalan utama yang menghubungkan Depok dengan Jakarta), Depok Lama, Perumnas I dan II. Di kawasan ini terdapat empat tipe pemukiman yang menjadi pertanda fase-fase perkembangan sosial ekonomi Depok. Pertama adalah Depok Lama, pemukiman pertama yang mapan dan menyisakan warisan historis saat Depok dijadikan sebagai penghasil komoditi perkebunan untuk pasar dunia. Depok Lama ini sekarang masih asri dan ditandai oleh rumah-rumah bergaya kolonial Belanda. Tata letak dan infrastruktur bekas kota kolonial ini sangat baik.

Kedua, adalah perumnas. Pemukiman ini adalah *pilot project* Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional dan dengan 20.867 unit rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah-bawah dan dihuni pada tahun 1976 (BPS, 1989:4). Saat ini penduduk Perumnas sudah memasuki generasi ketiga. Generasi pertama yang menghuni Perumnas pada pertengahan tahun 1970-an sudah pensiun. Sementara generasi keduanya (sewaktu Perumnas mulai dihuni mereka masih anak-anak) saat ini sudah memasuki usia produktif dan sudah berkeluarga.

Ketiga, adalah “real estate”, yang merupakan pemukiman untuk lapisan sosial yang memiliki penghasilan atas. Kompleks perumahan “real estate” merupakan pemukiman yang memiliki fasilitas yang sangat baik. “Real estate” bermunculan pada awal tahun 1990-an setelah infrastuktur Kota Depok semakin baik. “Real Estate” ini dibangun oleh perusahaan swasta setelah suburban ini menjadi wilayah investasi yang menjanjikan, khususnya setelah kampus Universitas Indonesia berada di Depok. Kompleks perumahan “real estate” yang berada di Depok dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, kompleks perumahan “real estate” yang dibangun untuk golongan penduduk yang berpenghasilan tinggi. Contoh tipe “real estate” ini adalah Pesona Depok. Perumahan ini dihuni oleh kelompok lapisan menengah masyarakat yang tumbuh pada masa Orde Baru. Penghuni Pesona Depok ini adalah pasangan muda yang baru menata hidup dan para pensiunan yang memilih tinggal di perumahan ini karena merasa nyaman dan aman.

Pengembang Pesona Depok terus membangun pemukiman golongan atas ini yang disebut Pesona Depok II dan Pesona Khayangan. Kedua, adalah tipe “real estate” untuk golongan penduduk yang berpenghasilan lebih bawah. Tipe perumahan yang mewakili tipe ini adalah kompleks perumahan Griya Depok Asri. Kompleks perumahan Griya Depok Asri ini mulai dihuni pada tahun 1989. Tipe Real estate seperti Griya Depok Asri ini banyak tumbuh di Depok II seperti Lembah Depok Asri.

Keempat, adalah kampung. Kampung merupakan pemukiman untuk penduduk yang berpenghasilan bawah (Jellinek, 1995; Soemantri, 2000a;). Para penghuninya menyebut tempat tinggal mereka secara subjektif sebagai kampung. Penyebutan ini adalah untuk membedakan dengan kompleks perumahan. Dalam substansi istilah ini, perbedaan antara kampung dengan kompleks perumahan ditandai oleh (1) letak rumah kompleks ditata dengan rapih, dan (2) kehidupan sosial orang kompleks lebih mapan dari pada mereka.

Di kawasan ini, kita dapat menjumpai kampung-kampung yang sangat padat, bahkan cenderung kumuh. Kampung-kampung padat ini dicirikan oleh semakin banyaknya pondokan atau rumah kontrakan, berada di lokasi yang strategis dan memiliki akses terhadap transportasi publik yang memadai. Sebagai contoh adalah Kampung Sawah. Kampung Sawah ini bersebelahan dengan dengan stasiun kereta api. Karena posisinya yang strategis, Kampung Sawah menjadi incaran para pendatang untuk bermukim. Sebagian dari mereka membeli tanah dan membangun rumah. Namun sebagian besar adalah pencari rumah kontrakan. Pengadaaan rumah kontrakan ini memang tumbuh pesat di Kampung Sawah.

Para pendatang yang tinggal di Kampung Sawah adalah para komuter yang bekerja di Jakarta dan pekerja sektor informal yang mencari poenghidupan di pusat-pusat perdagangan Depok. Tingginya permintaan rumah di Kampung Sawah ini akibat posisinya yang strategis dan perkembangan kota Depok, telah merubah wajah Kampung Sawah menjadi kampung yang sangat padat di pusat Kota Depok.

Kawasan sekunder. Kawasan ini terdapat di pinggiran kota Depok, yang ditandai oleh kantor pemerintahan untuk tingkat kecamatan dan pusat perbelanjaan yang lebih lokal. Tidak ada perusahaan negara yang berlokasi di kawasan sekunder ini. Perusahaan swasta pun hanya yang berskala kecil, seperti department store dan took serba ada. Fungsi sosial ekonomi kawasan ini, terutama adalah penyalur barang-barang komoditi dari kawasan komersial utama ke pemukiman.

Contoh yang mewakili tipe kawasan sekunder ini adalah Beji di Depok Utara. Di lokasi tersebut terdapat pusat perbelanjaan untuk pemukiman sekitarnya, Kantor Kecamatan dan Kantor Polisi Kecamatan.

Pemukiman yang ada di kawasan sekunder ini merupakan pemukiman penduduk yang berpenghasilan menengah, baik yang dibangun oleh Perumnas maupun pengembang swasta. Di Beji, Depok Utara misalnya, di lokasi tersebut kita dapat menjumpai perumahan perumnas Depok Utara dan kompleks perumahan Beji yang dibangun oleh pengembang swasta. Selain itu, di kawasan sekunder ini kita juga dapat menjumpai tipe kampung lain, yaitu “woodland” kampung.

“Woodland” kampung adalah pemukiman asli Depok. Berbagai studi, baik yang dilakukan oleh Krausse (1975), Marzali (1989) maupun Somantri (2000), memperlihatkan bahwa woodland merupakan pemukiman asli di wilayah pingiran Jakarta. Tipe pemukiman ini dicirikan oleh masih banyaknya pepohonan, rumah-rumah penduduk yang masih jarang, dan antar anggota penduduk asli masih memiliki ikatan kekerabatan. Ciri lainnya adalah bahwa woodland kampung juga merupakan pemukiman yang dihuni lapisan penduduk yang berpenghasilan bawah. Sebagian besar mereka memiliki mata pencaharian di sektor informal dan bagian marjinal dari sektor formal.

Contoh kampung yang memiliki tipe ini adalah Kukusan. Kukusan masih dapat dikatakan sebagai woodland. Proses perkembangan Kukusan lebih lambat dibandingkan dengan kampung-kampung lain. Hal ini disebabkan karena migrasi masuk ke Kukusan lebih didominasi oleh mahasiswa yang mencari pondokan. Selain itu, lokasi Kukusan yang kurang strategis dan akses transportasi publik yang kurang memadai, membuat para migran enggan untuk tinggal di Kukusan.

Proses pertumbuhan kampung padat di kawasan sekunder ini sama dengan proses perubahan Kampung Sawah. Asalnya kampung-kampung tersebut merupakan “woodland” kampung, yang dicirikan oleh masih banyaknya pepohonan, rumah-rumah yang masih jarang dan kuatnya ikatan kekerabatan antara satu warga dengan yang lain. Perkembangan Kota Depok yang dipicu oleh dihuninya Perumnas dan hadirnya Kampus UI, merupakan faktor utama perubahan ini. Banyak migran yang pindah ke kampung di kawasan Beji tersebut. Sebagian membeli rumah-rumah di kompleks perumahan yang dibangun oleh Perumnas dan pengembang swasta. Sebagian lagi membeli tanah penduduk asli dan membangun rumah di situ. Namun, fenomena perubahan

dari woodland ke kampung “padat” di kawasan ini terjadi karena banyaknya orang yang pindah untuk mencari rumah kontrakan.

Dan terakhir adalah *Kawasan Tertier*. Kawasan ini memiliki lingkup substansi yang lebih kecil baik dari fungsi ekonomi maupun dari fungsi pemerintahan. Sebagian besar kawasan ini berada di bagian selatan Depok yang cenderung *rural*. Kawasan sekunder ini hanya memiliki perusahaan swasta yang berskala kecil, seperti toko serba ada. Fungsi utama toko serba ada ini adalah menjual barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari penghuni pemukiman, sebagai salah satu mata rantai penyaluran barang-barang komoditi dari kawasan primer (atau bahkan dari pusat perdagangan di Jakarta) ke pemukiman. Tidak ada perusahaan negara yang berlokasi di kawasan sekunder ini. Demikian pula dengan sektor informal yang muncul di kawasan ini juga berperan sebagai penyalur barang-barang komoditi dari kawasan primer utama ke pemukiman.

Perempatan Rangkapan Jaya Lama merupakan contoh yang baik. Di perempatan itu terdapat toko serba ada. Toko serba tersebut berfungsi menyalurkan komoditi harian ke pemukiman-pemukiman penduduk. Disitu juga terdapat Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Lama. “Woodland Kampung” umumnya berlokasi di kawasan tertier ini.

Di kawasan ini kita masih dapat menjumpai sektor ekonomi agraris. Wilayah Selatan Depok ini merupakan penghasil buah-buahan (Durian, rambutan dan Jeruk). Akan tetapi karena terjadi alih pengelolaan lahan (Lihat Tabel 1) dan atau alih profesi (lihat Tabel 2), saat ini sektor ekonomi agraris ini semakin menyusut (lihat juga Melanie, 1996).

Tabel 1
Perubahan Struktur Wilayah Kota Depok

	1974	1982	1999	2005*
Pemukiman	20,00%	47,18%	54,76%	46,51%
Industri	0,00%	1,56%	1,72%	1,73%
Pertanian	64,23%	34,81%	23,23%	22,22%
Lain-lain	15,77%	16,45%	20,29%	29,54%
Jumlah	100%	100%	100%	100%

Sumber: Pemda Depok, 1999 dan Pangemanan, 1985.

Lain-lain: Tanah kosong, lahan untuk rekreasi dan olah raga, pendidikan, gardu listrik, dipo kereta api, kuburan, rawa dan danau.

* Angka proyeksi

Table 2
Perubahan Jenis Mata Pencaharian Penduduk Depok

No.	Jenis Mata Pencaharian	1991	1997	Persentase Perubahan
1.	Petani	38.558	22.036	- 42,85%
2.	Pedagang	26.741	53.076	98,47%
3.	Buruh	27.729	60.466	118,06%
4.	Pegawasi Swasta	20.030	65.744	228,22%
5.	Pegawai Negeri	17.409	60.640	248,32%
7.	Lain-lain	17.404	105.534	3025,52%
	Total	147.871	372.494	151,90%

Sumber: Diolah dari Ibrahim, 1998.

Sekalipun fungsi tanah telah beralih menjadi kompleks perumahan, namun lantaran perumahan itu pula banyak melahirkan kesempatan kerja baru seperti pembantu, tukang ojek dan tenaga keamanan. Umumnya mereka masih tinggal di kampungnya dan pergi ke perumahan hanya untuk mencari nafkah. Patrijuniantri et.al (1992) yang melakukan penelitian tentang hubungan saling menguntungkan antara warga “woodland” kampung dengan kompleks perumahan memperlihatkan bahwa banyak perempuan “woodland” kampung yang menjadi pembantu rumah tangga untuk penghuni kompleks perumahan tetangganya. Para pembantu ini hanya bekerja kurang lebih selama 12 jam sehari, dari pagi hingga sore. Mereka mengerjakan berbagai pekerjaan layaknya pembantu biasa (membersihkan rumah, mencuci dan mengasuh anak kecil). Menjelang sore mereka kembali ke rumah masing-masing.

Dua Momen Transformasi

Struktur hirarki kawasan kota ini dapat menginformasikan fase-fase transformasi sosial ekonomi yang terjadi di Depok sebagaimana tergambar pada Tabel pertumbuhan penduduk di bawah ini. Data tersebut juga menginformasikan momen-momen tertentu yang mengakselerasi proses tersebut. Dengan demikian, selain memperlihatkan fase-fase awal transformasi, diskusi tentang tiga kawasan tersebut juga akan menginformasikan tentang fase terkini proses

transformasi sosial ekonomi tersebut, sekaligus juga menginformasikan proses perubahan dan pembentukan pola hubungan Depok-Jakarta.

Pertama, adalah fase awal transformasi Depok. Fase ini dimulai dengan dihuninya Perumnas Depok (20.817 unit) dari tahun 1976-1980. Hanya dalam kurun dua tahun (1976-1978), jumlah penduduk Depok meningkat sebesar 20,74%. Salah satu implikasi dihuninya Perumnas ini adalah bahwa pusat kehidupan sosial ekonomi Depok tidak lagi terpusat di Depok Lama. Beberapa sektor ekonomi negara mulai berfungsi. Sektor ekonomi informal pun bermunculan dalam kerangka menyediakan kebutuhan sehari-hari para penduduk. Mereka berperan sebagai penyalur antara pusat perdagangan dengan penduduk yang tinggal di pelosok. Di tingkat administratif, akselerasi sosial ekonomi ini akhirnya diakomodasi dalam bentuk perubahan status Depok menjadi Kota Administratif. Fase awal transformasi ini membentuk struktur inti kota Depok atau yang kita sebut sebagai kawasan primer kota.

Tabel 3
Perkembangan Jumlah Penduduk Depok Population 1976-1999

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/km
1976	94.144	1.400,0
1978	113.671	1.690,4
1979	131.252	1.951,8
1980	203.499	3.026,2
1982	233.799	4.169,8
1990	280.916	5.010,1
1992	329.309	5.872,2
1995	345.935	6.169,7
1999	866.214	4.224,5

Sumber: Data diolah dari Bapeda Kodya Depok 1999, Sapta, 1994, and Pangemanan, 1985.

Ket: Dari tahun 1976-1980 luas Depok 6.724,57 acre. Tahun 1982-1999 luas Depok adaaalah 5.607 hektar.

Tahun 1999 luas Depok menjadi 20.504,54 hektar.

Selain Perumnas, kepindahan Kampus Universitas Indonesia (salah satu universitas terkemuka di Indonesia) ke Depok pada tanggal 5 September 1989 merupakan titik tolak transformasi sosial ekonomi Depok modern lainnya. Kepindahan kampus yang diikuti oleh civitas akademiknya mengakibatkan tumbuhnya sektor informal “baru”. Sebagian besar para pendatang baru ini adalah kalangan menengah yang memiliki daya beli yang lumayan. Mereka membutuhkan tempat tinggal, makan sehari-hari dan kebutuhan penunjang lainnya. Sebagian

kebutuhan mereka ini dipenuhi oleh penduduk asli sekitar, walaupun sebagian ada pula yang dilayani oleh pemilik modal yang membuka warung makan, tempat kost bahkan hiburan secara besar dan professional (lihat Prayogo, 1989).

Keberadaan UI ini turut mempercepat perbaikan dan pengadaan infrastuktur Kota Depok, terutama kereta listrik dan jalan raya. Sebagai contoh, tahun 1989, Jalan Margonda (jalan utama yang menghubungkan Depok dengan Jakarta) diperbesar menjadi dua jalur (masing-masing lebarnya 5 meter) dan lurus mengikuti jalur rel kereta listrik. Tahun 1992, jalur rel ganda kereta listrik dapat dioperasikan. Tahun itu juga Depok memiliki terminal bus dalam dan luar kota yang memadai. Perbaikan infrastuktur Kota Depok ini membuat Depok menjadi wilayah yang semakin menarik bagi para investor untuk mencoba berbisnis di wilayah tersebut.

Akibatnya, berbagai sektor ekonomi swasta (menyertai sektor ekonomi negara yang telah ada) semakin tumbuh di kawasan primer Depok. Menurut catatan resmi pemerintah Kota, pada tahun 1999 Depok sudah memiliki 5 hotel, 96 rumah makan, 15 pasar harian, 17 toko swalayan, 4 buah mall dan 2.847 buah took. Dinamika ekonomi Depok ini ditopang oleh 10 bank pemerintah, 36 bank swasta dan 17 bank perkreditan rakyat. Belakangan, sektor ekonomi informal pun tumbuh lebih cepat berkaitan berubahnya pusat kota Depok menjadi pusat bisnis. Sektor ekonomi informal ini berfungsi menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi para pegawai negeri, pekerja sektor formal dan para mahasiswa di kawasan primer Depok.

Implikasi sosial ekonomi lain dari kepindahan Kampus Universitas Indonesia ini adalah terbentuknya kawasan sekunder Depok. Di perempatan Beji (Depok Utara), misalnya, kawasan ini terbentuk setelah kepindahan Kampus Universitas Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Kehadiran Kampus Universitas Indonesia ini membuat para pendatang pindah ke kawasan ini, baik untuk membangun rumah sendiri maupun untuk mengontrak rumah.

Sedangkan kawasan tertier terbentuk pada pertengahan tahun 1990-an, setelah bagian selatan Depok menjadi incaran para pengembang untuk membangun perumahan. Di Rangkapan Jaya, misalnya, dibangun sebuah kompleks perumahan pada tahun 1990-an. Hal tersebut terjadi karena pada tahun-tahun itu, infrastuktur dan akomodasi Depok semakin membaik. Selain itu harga tanah yang tidak terlalu tinggi menyebabkan perumahan daerah tersebut masih terjangkau oleh para pembeli kalangan menengah-bawah.

Otonomi dan Politik Lokal

Percepatan dinamika sosial ekonomi Depok ini mendorong terjadinya status administratif tahap kedua. Pada tanggal 27 April 1999, Depok memiliki otonomi. Selain perubahan peruntukkan lahan dan mata pencaharian penduduk yang cepat (lihat Tabel 1 dan 2), indikator sosial ekonomi lain yang mempercepat akomodasi secara administratif ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Swadaya Masyarakat (Tabel 4 dan 5), serta meningkatnya jumlah nilai proyek sektor swasta secara mengesankan, naik 79 kali lipat hanya dalam kurun 4 tahun (1989-1993) (Tabel 6). Percepatan sosial ekonomi ini mendorong kesimpulan bahwa dari aspek keuangan, Pemerintah Kota Depok sudah mampu mengelola wilayahnya sendiri, dan dengan demikian dapat mandiri secara ekonomi dari Pemerintah di atasnya (cf. Sarwo, 1996).

Table 4
Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor (1990-1995)

Jumlah Anggaran	Total Pendapatan
1990-1991	1.428.410.896
1991-1992	1.451.937.320
1992-1993	2.193.932.720
1993-1994	2.746.649.413
1994-1995	4.276.389.509

Sumber: Diolah dari Sarwo, 1996:81

Table 5.
Dana Swadaya Masyarakat

Tahun	Jumlah
1993/94	1.951.921.000
1994/95	3.855.308.850
1995/96	5.586.088.850
1996/97	5.161.409.250
1997/98	4.060.752.000

Sumber: Pemerintah Kotamadya Depok 1998

Table 6.
Total Nilai Proyek 1989-93

Tahun	Nilai Proyek	
	Sektor Pemerintah	Sektor Swasta
1989/90	4.558.713.000	1.587.894.000
1991/92	3.943.943.100	17.638.002.175

1993/94	9.578.247.000	79.690.000.000
---------	---------------	----------------

Sumber: Pemerintah Kotamadya Depok 1998

Wilayah Kota Depok (seluas 20.504,52 ha) ini terdiri dari bekas wilayah Kota Administratif (5.607 ha) ditambah dengan tiga kecamatan (Limo Cimanggis dan Sawangan) dan 5 desa (Desa Bojong Pondok Terong, Desa Ratujuaya, Desa Pondok Jaya, Desa Cipayung dan Desa Cipayung Jaya) yang diambil dari wilayah Kabupaten Bogor. Dengan demikian, secara administratif, Depok memiliki kawasan yang memiliki status yang cenderung *rural* (39 desa), dan selebihnya sudah memiliki status administratif yang bercorak urban (24 kelurahan) Pada tanggal 8 Februari 2000, Kota Depok telah memiliki seorang Walikota yang dipilih secara demokratis. Pasangan kandidat dari Golkar memperoleh kemenangan secara mutlak, 32 suara dari 45 suara di Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah runtuhnya Orde Baru, pola politik akar rumput di Depok mengalami perubahan yang signifikan. Status Otonomi yang dimiliki oleh Depok berdasarkan UU NO. 19/1999 telah membuat politik lokal Depok menjadi sangat dinamis. Banyak partai politik yang berdiri dan menjadi lembaga perantara antara komunitas-komunitas dengan proses pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan kota. Malah sebagian partai-partai tersebut, seperti PKB, PAN dan PK, merupakan formalisasi dari lembaga-lembaga keagamaan milik komunitas tersebut yang telah tumbuh sejak lama, bahkan ada yang berdiri sebelum masa Orde Baru (Priyadi dan Suryana, 2001).

PK misalnya, tumbuh sebagai kekuatan politik yang signifikan di Depok. PK menempati posisi ke-5 dalam perolehan suara di Depok. Bahkan di Perumnas, PK menempati posisi ke-3, di bawah PAN dan PDIP. Signifikannya peran politik PK di Depok hanya dapat dipahami dengan melacak suatu pertumbuhan generasi baru lapisan menengah penghuni Perumnas yang memiliki kesadaran keislaman yang kuat. Kesadaran keagamaan pada generasi ini tumbuh sebagai antitesis terhadap kebijakan Islam Orde Baru yang represif dan globalisasi yang secara kuat menerpa perkotaan di Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an, pada saat mereka masih pelajar SMU. Keadaran ini kemudian diterapkan untuk mengembangkan aspek kelembagaan institusi keagamaan dimana mereka tinggal, seperti mendirikan dan mengelola pengajian anak-anak, kegiatan Ramadhan dan lain sebagainya.

Fase ini merupakan tahap awal saat PK (yang waktu itu masih berbentuk gerakan sosial keagamaan) melakukan investasi sosial. Pada saat mereka menjadi sebuah partai politik formal (yang dipicu oleh angin segar reformasi yang memungkinkan setiap golongan-golongan sosial di Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik formal kenegaraan), “investasi sosial” ini menjadi modal dasar partai. PK pun menjadi partai yang relatif *familiar* di kalangan warga Perumnas. Bahkan dengan modal ini, PK dapat menggunakan ruang publik fasilitas Perumnas, seperti lapangan dan mesjid, untuk berkampanye walau secara terselubung. Warga memiliki toleransi yang besar terhadap PK karena tingkat kepercayaan dan familiar terhadap PK sudah demikian tinggi.

Penutup

Diskusi dalam artikel ini berpijak pada gagasan bahwa transformasi sosial ekonomi Depok terjadi saat Depok mengalami suburbanisasi terhadap Jakarta. Dalam bagian awal artikel ini terlihat bahwa proses suburbanisasi Depok terjadi seiring dengan pergeseran fungsi Depok terhadap Jakarta. Struktur sosial ekonomi yang terbentuk pun merupakan akibat dari pergeseran fungsi penyangga Depok ini. Bentuk suburbanisasi yang paling dini, misalnya, terlihat bagaimana suatu struktur sosial ekonomi yang bercorak kolonial terbentuk tatkala Depok mengalami perubahan fungsi penyangga (dari sekedar tempat transit jalur perdagangan (untuk pasar internasional) sungai pada masa Pajajaran menjadi daerah penghasil komoditi perkebunan).

Dalam posisinya ini, Depok terpengaruh secara mendalam tatkala Pemerintah Kolonial melakukan restrukturisasi kebijakan dalam rangka memantapkan posisinya sebagai penghasil komoditi dunia. Keterpengaruhannya ini disebabkan karena Depok memperoleh *privelege-privelege* tertentu yang bersumber pada posisi penyangganya ini dan kesetiaan komunitas Depok Lama terhadap Pemerintah Belanda. Demikian pula tatkala Pemerintah Kolonial Belanda membangun jalur kereta api antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor), jalur tersebut melalui Depok. Pemilihan untuk melalui Depok ini sesuai benar dengan fungsi kolonial kereta api sebagai alat transportasi untuk menyalurkan komoditi perkebunan ke Batavia. Jadi pemilihan ini disebabkan karena Depok merupakan salah satu daerah penghasil komoditi perkebunan.

Privelege yang lain (sebagai realisasi dari Kebijakan Pintu Terbuka dan Politik Etis) terjadi saat Pemerintah Kolonial membangun pendidikan Belanda di Depok. Akibatnya, sebagian penduduk Depok Lama mengalami proses mobilitas vertikal dengan menjadi pegawai pemerintah dan pegawai swasta di Batavia (yang tumbuh subur sebagai penyalur yang efisien komoditi perkebunan ke pasar dunia setelah Kebijakan Pintu Terbuka) dengan cara menjadi penglaju harian.

Akan tetapi lantaran daya tarik komoditi ini pula Orang Depok Lama mengalami nasib yang tragis pada masa Pendudukan Jepang. Jepang membenci dan melarang semua yang berbau Belanda. Ekspresi tersebut merupakan bentuk yang paling total dari usaha Jepang untuk memperoleh komoditi yang laku di pasar dunia tersebut. Setelah masa Jepang ini, Orang Depok Lama mengalami, yang oleh Marzali (1975) disebut, “krisis identitas” yang berkepanjangan.

Suburbanisasi modern Depok terhadap Jakarta terjadi saat terbentuk sistem pembagian kerja internasional baru. Pembagian kerja internasional ini tidak tersusun atas negara-negara selatan sebagai penghasil komoditi dan negara utara sebagai pemakainya. Sistem pembagian kerja internasional ini bertumpu pada perluasan pasar dalam bentuk sistem produksi yang justru dilakukan di negara-negara yang menjadi pangsa pasarnya. Jadi, dalam sistem pembagian kerja internasional ini, perusahaan multinasional memegang peranan yang sangat penting. Perusahaan ini melakukan mobilitas modal (dalam bentuk relokasi produksi) ke negara periperhal, baik karena alasan dari dalam negaranya sendiri, dan atau terdorong oleh biaya produksi yang lebih murah maupun untuk menguasai pasar di negara yang dituju (Glickman, 1993).

Jakarta pun terkena implikasi sosial ekonomi sistem pembagian kerja internasional ini. Pemerintah Orde Baru, yang menguasai panggung politik Indonesia pada penghujung 1960-an, mengganti politik isolasi warisan Soekarno menjadi politik liberalisasi ekonomi (Mas’ud, 1989). Akibatnya, banyak perusahaan multinasional yang melakukan investasi di Indonesia, baik yang berbentuk membuka cabang-cabang maupun relokasi pabrik. Sebagian mobilitas modal ini terkonsentrasi di Jakarta. Akhirnya Jakarta pun terlibat secara intensif dalam investasi, perdagangan dan produksi global (Somantri, 2000a).

Keterlibatan Jakarta secara intensif ini melahirkan kesempatan-kesempatan kerja baru baik di sektor negara, sektor ekonomi formal, maupun sektor ekonomi informal. Akibat adanya kesempatan-kesempatan kerja baru ini terjadilah ledakan migrasi desa-kota. Penduduk Jakarta

melonjak cepat. Pada awal 1970-an, penduduk Jakarta kurang dari 4 juta, maka pada tahun 1975 sudah mencapai 5 juta (dikutip dari Somantri, 2000a). Pertumbuhan penduduk yang cepat ini mendorong lahirnya kebutuhan akan rumah. Dalam konteks ini, Perum Perumnas membangun perumahan dalam skala besar di Depok. Pemilihan Depok sebagai lokasi *pilot project* Perumnas ini kurang lebih disebabkan dua alasan. Pertama, lokasi Depok tidak terlalu jauh dari Jakarta. Kedua, Depok merupakan wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api Jakarta-Bogor, sehingga memungkinkan penghuni Perumnas berkomutasi ke Jakarta.

Perumahan Perumnas ini merupakan titik tolak fase pertama transformasi sosial ekonomi Depok. Pada bagian tentang hirarki kawasan kota, dua momen transformasi, dan otonomi dan politik lokal, kita telah mendiskusikan secara mendalam tentang proses transformasi dan implikasi sosial ekonominya sehingga Depok memiliki kawasan primer, sekunder dan tertier. Diskusi pada bagian ini juga telah memperlihatkan kepada kita tentang implikasi sosial ekonomi peningkatan keterlibatan Jakarta dalam sistem ekonomi dunia terhadap Depok. Sebagai contoh, tatkala integrasi pasar Jakarta terhadap pasar global semakin mendalam (yang ditandai oleh berdirinya mal dan restoran *fast food* Amerika) pada pertengahan tahun 1990-an. Hal yang sama juga dialami (terutama kawasan primernya) oleh Depok. Berbagai perusahaan swasta pun (seperti mal, restoran *fast food* Amerika dan bank-bank swasta) tumbuh pesat. Perusahaan yang ada di Depok merupakan cabang dan hanya berperan instrumental. Sementara pengambilan keputusan dilakukan oleh kantor pusatnya yang berlokasi di Jakarta dan sebagian lagi di negara-negara inti.

Implikasi sosial ekonomi integrasi pasar Jakarta ini adalah semakin lengkapnya infrastruktur Kota Depok. Sejak saat itu, kawasan primer Depok sudah dapat menyediakan hampir semua kebutuhan penduduk Depok, yang sebelum itu hanya dapat diperoleh di pusat-pusat perdagangan Jakarta. Gejala ini merupakan pertanda bahwa Depok memasuki tahap kedua hubungannya dengan Jakarta (1995-2000). Sebelumnya pada fase pertama hubungan Depok-Jakarta, segala kebutuhan penduduk Depok hanya dapat diperoleh dari pusat-pusat perdagangan Jakarta.

Pada tingkat formal administrasi, transformasi sosial ekonomi Depok ini mendorong lahirnya suatu tuntutan terhadap otonomi. Gejala ini karena proses transformasi tersebut telah melahirkan berbagai potensi keuangan yang bermanfaat untuk menata Kota Depok. Akan tetapi

karena tidak memiliki otoritas otonomi, Aparat Kota Depok tidak dapat menggali potensi keuangannya tersebut secara leluasa.

Tanggal 27 April 1999, Depok memperoleh otonomi. Atas dasar wewenang ini, Pemerintah Kota dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal Depok. Namun dalam kaitannya dengan posisi dengan sebagai penyangga Jakarta, Depok dituntut harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan Jakarta. Suatu bentuk kompromi sedang dirumuskan, dengan apa yang oleh salah satu staf Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah Kota Depok disebut sebagai “perencanaan berimbang”. Agaknya wacana reformasi yang cenderung berpihak pada otonomi daerah dan perluasan partisipasi publik di tingkat lokal, dapat menjadi pendorong bagi perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal Depok tersebut.

Bibliography

- Allinson, Garry D (1979) *Suburban Tokyo: A Comparative Study in Politics and Social Change*. London: University of California Press.
- Bappede Kota Depok (1999): *Depok: Dari Kota Administratif ke Kotamadya Daerah Tingkat II*
- Biro Pusat Statistik (1982): *Statistik Pembangunan Perumahan Indonesia*, Jakarta
- Danasasmita, Saleh (1983): *Sejarah Bogor: Bagian I*, Bogor: Pemerintah Daerah Kotamadya DT II Bogor
- Djumhur (1996): “Sekilas Sejarah Depok”. Dalam Pemerintah Kota Administratif Depok, *Info Depok-6*
- Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Administratif Depok (1996): *Data Perumahan Di Wilayah Kota Administratif Depok*
- Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Administratif Depok (1996) *Data Penduduk Kotif Depok 1996-1997*
- Dougless, Mike (1993) “The “New” Tokyo Story: Restructuring Space and The Struggle for Place in A World City”. Dalam Kuniko Fujita and Richard Child Hill, *Japanese Cities in The World Economy*, Philadelphia: Temple University Press.
- Glickman, Norman J (1993): “Cities aand the International Division of Labor. Dalam Michael Peter Smith dan Joe R. Feagin (eds.), *The Capitalist City*. Oxford Basil Blackwell Ltd.
- Hatta., Liswarti et.al. (1994): *Profil Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Jalan Margonda Raya Depok*, Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Ibrahim, Linda D (1998): “Masyarakat Perkotaan dan Perubahan Kondisi Lingkungan”. Makalah yang Dipresentasikan dalam Seminar *Menuju Depok Sebagai Kota Pendidikan*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Iskandar, Kurniawati (2000) “A Social Profile of Depok: Summary of the Results of Sample Household Survey”. Dalam Gumilar Rusliwa Somantri, *Shaping Suburbia: A Study of New Town Societies in Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.

- Kano, Hiroyoshi (2000a) "Tokyo and Jakarta: Preliminary Notes Toward a Comparative Sociological Study of Two Asian Megalopolises". Dalam Gumilar Rusliwa Somantri, *Shaping Suburbia: A Study of New Town Societies in Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.
- (2000b) "Tama New Town: The Growth of a New Residential Area in a Suburb of Tokyo". Dalam Gumilar Rusliwa Somantri, *Shaping Suburbia: A Study of New Town Societies in Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.
- (2000c) "The Socioeconomic Profile of Tama New Town Residents: An Analysis of Statistical Survey Data". In Gumilar Rusliwa Somantri, *Shaping Suburbia: A Study of New Town Societies in Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Centre for Japanese Studies University of Indonesia.
- (2000d) "Tama and Depok: Comparative Anatomy of Suburban New Towns in Tokyo and Jakarta". Dalam Gumilar Rusliwa Somantri, *Shaping Suburbia: A Study of New Town Societies in Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.
- Kiyonori, Todaro (1993) "Restructuring Urban-Industrial Links in Greater Tokyo: Small Producers' Responses to Changing World Markets". Dalam Kuniko Fujita and Richard Child Hill, *Japanese Cities in The World Economy*, Philadelphia: Temple University Press.
- Jellinek, Lea (1995): *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial di Sebuah Kampung di Jakarta*, terjemahan Eddy Zainuri, Jakarta: LP3ES.
- Mantri Statistik Kotip Depok (1994): *Kotip Depok Dalam Angka 1993*.
- Marzali, Amri (1975): "Krisis Identitas Pada Orang Depok Asli" *Berita Antropologi*
- (1989) "Development and Urbanization in Condet", *Berita Antropologi* January-Maret 1989.
- Melanie, Marrian (1996): *Struktur Pemukiman Kotip Cimahi Dan Kotip Depok*, Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Geografi FMIPA Universitas Indonesia.
- Meyer, David R. (1986): "System of Cities Dynamics in Newly Industrializing Nations", *Studies in Comparative Internasional Development Volume XXI, Number I*
- Partrijunianti, Endang MA., et.al. (1992): *Profil Wanita Betawi di Desa Grogol yang Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga: Studi Kasus: di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia
- Pengemanan, Benny (1985): *Pengembangan Organisasi Wilayah Kecamatan Depok Menjadi Kota Administratif Depok*, Jakarta: Skripsi Sarjana Jurusan Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
- Kota Administratif Depok (1998): *Ekspose Walikota Depok*
- Peornomo, Indria Kartini Keluarga (1994): *Orang Depok Asli: Suatu Kajian Terhadap Identitas Etnis Orang Depok Asli di Kelurahan Depok*. Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia.
- Prayogo, Dody (1989): *Deskripsi Perubahan Pola Mata Pencaharian Penduduk: Kajian Mengenai Perubahan Struktur Okupasi dan Pandangan Tentang Pekerjaan: Studi Kasus Di Desa Beji Timur, Kecamatan Beji Kotif Depok, Jawa Barat*, Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia.
- Priyadi, Eko S. and Asep Suryana (20001) "Kampanye, Kesalehan dan Politik Lokal: Siasat Partai Keadilan dalam Pemilu 1999". *Jurnal Kajian Timur Tengah dan Islam* Vol. IV.

- Poernomo, Sri Murniati (1990): *Gereja Immanuel Depok: Suatu Penelitian Pendahuluan*, Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Sarwo, Sri Rahayu (1996): *Potensi Keuangan dan Ekonomi Kabupaten Dati II Bogor di Wilayah Kota Administratif Deppok Menuju Perubahan Status Menjadi Kotamadya Dati II Depok*. Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
- Smith, David A (1996) *Third World Cities in Global Perspective: The Political Economy of Uneven Urbanization*, Colorado: Westview Press, Inc.
- Smith, Michael Peter dan Joe R. Feagin (eds.), *The Capitalist City*. Oxford Basil Blackwell Ltd.
- Somantri, Gumilar Rusliwa (2000a) *Migration within Cities: A Study of Socioeconomic Processes and Intra-City Migration in Jakarta*. Breitenbach, Saarbruecken and Port Lauda
- (2000b) "Urban Expansion and Sub-urbanization in the Capital Cities: A Comparative Study on Tokyo and Jakarta". Dalam Gumilar Rusliwa Somantri, *Shaping Suburbia: A Study of New Town Societies in Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.
- (2000c) "Pattern of Intra-City Migration In Tokyo's and Jakarta's Suburban Areas". Dalam Gumilar Rusliwa Somantri, *Shaping Suburbia: A Study of New Town Societies in Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.
- Tambunan, Drs. Mangapul P. (1995): *Analisis Pola Penggunaan Tanah Sepanjang Koridor Bundaran UI sampai km. 14 (Citayam) pada Tahun 1912, dan tahun 1994*, Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia
- Wulan, G. Ambar (1985): *Peranan dan Perkembangan Kereta Api di Jalur Semarang-Solo Pada Tahun 1864-1970*. Depok: Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.